



SABTU, 2 JUNI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

WTP Harus Dipertahankan

BPK Banyak Berikan Catatan

BENGKULU, BE- Setelah dua tahun berturut-turut hilang, akhirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu

resmi menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Yuan Candra Djasin SE MM AkCPA mengatakan, opini WTP diberikan, lantaran semua temuan pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada audit keuangan tahun 2017 telah diselesaikan oleh pemprov.

WTP

Temuan yang telah diselesaikan berupa kerugian negara sebesar Rp 6,876 miliar dan temuan bersifat administrasi serta penertiban aset. "Patut kita berapresiasi, karena tahun ini dapat WTP setelah hilang sejak tahun 2014 lalu," terang

Yuan dalam sidang paripurna penyerahan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (31/5) lalu.

Dijelaskannya, meski telah menerima WTP namun demikian masih ada catatan permasalahan yang harus dibenahi oleh pemprov. Catatan itu seperti lemahnya pengendalian interen hingga terjadinya kesalahan penganggaran di 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lalu BPK juga menilai, pelaksanaan investasi di Bank Bengkulu juga belum optimal dilakukan. Termasuk permasalahan aset SMA/SMK juga belum selesai pada tahun ini. Padahal, penertiban aset SMA/SMK sudah menjadi temuan pada LHP tahun 2016 lalu. "Permasalahan ini harus dipecahkan. Jika terus dibiarkan, maka akan berefek pada pemberian opini WTP," tambahnya.

A. PEMDA RAIH WTP

Pemprov
Pemkab Lebong
Pemkab Mukomuko

B. PEMDA RAIH WDP

Seluma
Benteng
Kepahiang
Kaur
Rejang Lebong
Bengkulu Selatan
Bengkulu Utara.

Tidak hanya itu saja, BPK juga menemukan masih banyaknya masalah atas kelebihan an pembayaran upah atas pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, irigasi serta berbagai program lainnya. Hal tersebut terjadi tidak hanya disatu OPD saja, namun terjadi di 26

OPD yang ada dilingkup Pemprov Bengkulu. "Kelebihan pembayaran sudah ada yang dikembalikan. Pengembaliannya juga dengan nilai cukup signifikan. Sehingga kita nilai ini masuk ambang batas yang bisa ditoleransi," tutur Yuan.

Berapa catatan yang belum diselesaikan, harus segera diselesaikan. BPK telah memberikan waktu 60 hari kedepan dalam penyelesaiannya. Sehingga LHP yang sudah diserahkan, tidak lagi berpengaruh kepada opini tahun depan. "Ada waktu 60 hari untuk penyelesaiannya," ungkapnya.

Yuan menegaskan, opini WTP ini harus dipertahankan oleh pemprov Bengkulu. Jangan sampai pemprov kembali menerima opini sama dengan tahun lalu, gagal menerima WTP. Dibeberkannya, BPK menilai memang sudah sewajarnya opini WTP tidak diberikan pada audit keuangan tahun 2016 lalu. Sebab, ada temuan kerugian negara cukup

besar pada 25 paket pekerjaan jalan senilai Rp 11,53 miliar. Salah satunya terjadi pekerjaan pembangunan jalan di Pulau Enggano. Saat ini, temuan itu sudah masuk proses pengadilan: "Kita lihat dari tahun ketahun memang sudah mulai meningkat untuk menerima WTP. Kita berharap, pemprov bisa terus mempertahankannya," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, opini WTP yang didapat ini merupakan berkah di bulan ramadan. Mengingat opini WTP sudah hilang selama dua tahun berturut-turut. Disamping itu, opini WTP juga dari hasil kerja keras semua pejabat pemprov. Termasuk pemantauan yang terus dilakukan, juga memberikan dukungin opini tersebut dapat kembali diterima. "Ini menjadi hari spesial, karena di bulan ramadan WTP bisa kita dapatkan," ujar Rohidin.

Dari hasil catatan BPK, Rohidin menegaskan tentu hal itu akan tetap ditindaklanjuti dari waktu 60 hari yang diberikan. Karena menurutnya, temuan itu banyak bersifat kualitatif. Termasuk pemprov yang menjadi pemegang saham utama Bank Bengkulu. Maka harus dibuat regulasi atau kesepakatan semua kabupaten/kota mendorong Bank Bengkulu menjadi sebuah keharusan. "Kalau Pemprov mengambil kebijakan untuk

menyeragamkan rekening di Bank Bengkulu itu merupakan sebuah upaya kita untuk memperkuat Bank Bengkulu yang menjadi rekomendasi BPK," jelasnya.

Meski demikian, pemprov akan tetap mempertahankan opini yang sudah didapatkan. Tentu caranya dengan memperkuat pejabatnya untuk selalu mengontrol semua kegiatan. Baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun telah selesai kegiatan.

"Kalau tim ini berkerja dengan sungguh-sungguh, data disajikan dengan lengkap, kalau ada temuan atau kesalahan cepat diperbaiki segera, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini dibutuhkan tim yang solid dan dukungan DPRD," ujar Rohidin.

Disisi lain, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri SSos mengatakan, opini yang telah didapatkan ini jangan sampai membuat lengah. Hingga mengharuskan nantinya opini WTP hilang. "Jangan sampai lengah, harus terus dipertahankan. Apa yang jadi rekomendasi harus sama-sama ditindaklanjuti," pungkas Ihsan.

Selain Pemprov, Opini WTP kali ini diperoleh Pemkab Lebong, Pemkab Mukomuko. Sedangkan wajar Dengan Pengecualian (WDP) diperoleh Pemkab Seluma, Benteng, Rejang Lebong, Kepahiang, Kaur, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara. (151)

WTP... Hal 11